

# HUBUNGAN ANTARA PEMERIKSAAN INTERN DENGAN TINGKAT PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA PT. BPRS HARUM HIKAMAHNUGRAHA GARUT

Irfan Nurul Haq  
STAI al Ihsan Curug  
Email: nurul\_haq@yahoo.com

**Abstrak:** Tidak dapat dipungkiri kehadiran Bank Muamalat merupakan cikal bakal berkembangnya bank syariah di Indonesia. Sehingga ia menjadi tolok ukur bank syariah yang lainnya, karena ia merupakan bank syariah pertama dan yang terbesar asetnya. Oleh karena itu, sangat menarik bagi penulis untuk mengkaji seberapa besar potensi Bank Muamalat untuk menjadi yang terdepan dan mampu mendongkrak dan mencapai target *market share* 5 % pada akhir 2008.

**Kata Kunci:** Pemeriksaan, Penyaluran, Biaya

## Pendahuluan

Dewasa ini pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia telah berkembang dengan pesat dan menjadi salah satu elemen penting yang akan dijadikan dasar untuk menilai keberhasilan kebijakan pemerintah. Pembangunan di bidang ekonomi ini tentu menyangkut masalah investasi baru dalam usaha untuk memperluas volume usaha.

Untuk melaksanakan keputusan berinvestasi tersebut mengharuskan pelaku bisnis untuk mencari dana baru. Salah satu cara yang diambil dalam menyediakan dana baru ialah dengan meminjam kepada pihak lain. Bank sebagai lembaga keuangan merupakan alternatif dalam mendapatkan dana tersebut.

Jasa-jasa yang tersedia dengan lengkap sangat penting bagi masyarakat. Bank akan berperan memperlancar jalannya lalu lintas per-

ekonomian sebagai perantara terjadinya transaksi-transaksi usaha, sehingga bank akan menjadi urat nadi perekonomian dimana arus ekonomi dan keuangan akan mengalir.

Karena itu, semua servis bank kepada masyarakat, peralatan canggih yang dimiliki, keterampilan personel dan lain-lainnya, adalah dalam rangka menjalankan peranan selaku perantara keuangan, artinya menjalankan dua fungsi utama bank yaitu, menghimpun dana masyarakat (*to receive deposits*) dan memberikan kredit (*to make loans*).<sup>1</sup>

Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*).<sup>2</sup> Melalui bank kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Saat ini perkembangan bank syariah semakin pesat. Hal ini dapat dilihat dari semakin bertambahnya bank konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS) dan juga jaringan kantor perbankan syariah dari tahun ke tahun.

Keberadaan bank maupun lembaga syariah diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh umat Islam untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui produk perbankan yang disediakan. Sebagaimana layaknya suatu bank, lembaga syariah juga menyediakan fasilitas penitipan uang dan pemberian kredit kepada semua sektor yang membutuhkan dana. Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh lembaga Islam yang mengembangkan konsep bebas bunga, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh lembaga syariah.

Tingkat persaingan antar bank dan resiko perkreditan yang tinggi,

---

<sup>1</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), cet IV, h. 79

<sup>2</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), cet IV, h. 46

menyebabkan manajemen bank perlu menerapkan suatu pengawasan intern yang memadai. Hal ini dalam organisasi perkeriditan diharapkan dapat mengatasi kesulitan dalam mengendalikan dana yang diperlukan untuk pembiayaan kredit. Dalam industri perbankan syariah kredit ini lebih dikenal dengan nama pembiayaan.

Masalah keamanan atas pembiayaan yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh bank syariah, karena adanya risiko yang timbul dalam sistem pembiayaan. Permasalahan ini bisa dihindari dengan menerapkan fungsi pengawasan yang bersifat menyeluruh (*multi layers control*), dengan tiga prinsip utama, yaitu: prinsip pencegahan dini (*early warning system*), prinsip pengawasan melekat (*built in control*) dan prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*).<sup>3</sup> Dengan kata lain diperlukan suatu pengawasan intern yang dapat menunjang efektivitas sistem pembiayaan pada bank syariah. Dengan terselenggaranya pengawasan intern yang memadai dalam bidang pembiayaan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam tubuh bank syariah tersebut.

Dalam menjalankan bisnis perbankan yang penuh dengan resiko Bank Syariah juga tidak terlepas dari resiko pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) sehingga Bank Syariah perlu mengatur strategi agar tingkat NPF di Bank Syariah tidak dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian.

Untuk mampu berperan sebagai badan usaha yang tangguh dan mandiri, bank syariah melalui usaha penyaluran dananya harus mampu meningkatkan efektivitas sistem pembiayaan dan berusaha sebaik mungkin mengurangi risiko kegagalan pembiayaan. Jika diteliti lebih dalam, kegagalan pembiayaan terutama disebabkan oleh lemahnya pengendalian serta pengawasan terhadap pembiayaan tersebut, dimana terdapat suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh audit intern sebagai lanjutan dari pengawasan pembiayaan, untuk memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan pembiayaan, dan telah memenuhi

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 221

prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan.

Saat ini kondisi perekonomian yang khususnya dalam dunia perbankan tengah mengalami krisis, dimana salah satu penyebabnya adalah banyaknya kredit macet atau dalam perbankan syariah disebut dengan pembiayaan bermasalah sebagai akibat dari pengelolaan pembiayaan yang kurang baik. Pembiayaan adalah kegiatan operasional terpenting dalam kegiatan operasi bank syariah, dimana pembiayaan memiliki nilai aset terbesar jika dibandingkan dengan kegiatan operasional bank yang lain. Oleh karena itu memang sudah sepantasnya bila bank syariah memberikan perhatian yang lebih kepada kegiatan pembiayaan dengan melakukan pengawasan pada bidang pembiayaan tersebut, karena pembiayaan yang bermasalah akan menjadi ancaman jika pihak perbankan syariah tidak dengan segera mengambil langkah penyelesaiannya.

Oleh karena itu sistem pemeriksaan intern terhadap pembiayaan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk tercapainya tujuan dalam pembiayaan. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan sampai seberapa jauh sistem yang telah ditetapkan dapat diandalkan kemampuannya untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran bank dapat dicapai secara efisien dan ekonomis serta menentukan sejauh mana struktur tersebut sudah berfungsi seperti yang diinginkan.<sup>4</sup> Hal ini harus didukung dengan sikap profesional dalam melaksanakan pekerjaannya dari para auditor intern/pemeriksa intern.

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2007-2008 pada PT. BPRS Harum Hikmah Nugraha Garut, maka ditemukan fenomena yang terjadi berkaitan dengan pemeriksaan intern dan penyaluran pembiayaan diantaranya pada tahun 2008 tingkat penyaluran pembiayaan mengalami penurunan yaitu sebesar 0,36%, walaupun secara total mengalami kenaikan dalam penyaluran tiap jenis pembiayaan, seperti yang terlihat pada data sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook :Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan Nasabah*, (Jakarta ; PT. RajaGrafindo Persada, 2006) h.725

Tabel 1.1 Tingkat Penyaluran Pembiayaan  
(1 =Rp. 1000 )

No	Jenis pembiayaan	Jumlah total dan pesentase pembiayaan per tahun					
		2007			2008		
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realiasi	%
1	Pembiayaan murabahah	1.753.919	1.452.725	82.83	1.932.000	1.575.959	81.57
2	Pembiayaan mudharabah	845.208	794.925	94.05	1.245.250	1.045.208	83.94
3	Pembiayaan musyarakah	1.435.005	1.225.525	85.40	1.936.085	1.585.105	81.87
4	Pembiayaan al-qardul hasan	1.276.456	1.176.456	92.17	1.976.400	1.975.000	99.93
Jumlah		5.310.588	4.649.631	<b>87.55</b>	7.089.735	6.181.272	<b>87.19</b>

Sumber : Laporan Keuangan.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa tingkat penyaluran pembiayaan belum menunjukkan hasil yang optimal, dimana terlihat dari setiap jenis pembiayaan mengalami penurunan rata-rata 0,36%. Hal ini disebabkan banyaknya nasabah yang ditolak dalam pemberian pembiayaan yang disebabkan kurangnya persyaratan yang ditentukan oleh PT.BPRS Harum Hikmahnugraha, dampak lain dari penurunan realisasi tingkat penyaluran pembiayaan disebabkan masih lemahnya pemeriksaan intern terhadap tingkat penyaluran pembiayaan. Disamping itu pula tingkat pelayanan yang diberikan oleh sebagian karyawan PT.BPRS Harum Hikmahnugraha masih rendah, seperti kurangnya pemahaman atau sosialisasi pemberian pembiayaan kepada masyarakat, belum efektifnya pembinaan terhadap karyawan baik melalui pendidikan dan pelatihan maupun pembinaan secara langsung dari pimpinan. Fenomena tersebut disebabkan oleh lemahnya pengawasan intern dari pimpinan baik dari tingkat dewan pengawas, direksi maupun tingkat manajer marketing.

## Pemeriksaan Intern

### *Pengertian Pemeriksaan Intern*

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan istilah pemeriksaan intern sebagai terjemahan dari bahasa aslinya yaitu *internal auditing*. Terjemahan *internal auditing* adalah bermacam-macam diantaranya pemeriksaan intern, bagian pengawasan intern, staf audit intern, sedangkan BUMN menggunakan istilah satuan pengawasan intern (SPI).

Pengertian pemeriksaan internal dari waktu ke waktu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman pada era globalisasi. Pada awal perkembangan, pemeriksaan intern hanya berfungsi sebagai penilaian independen pada suatu organisasi untuk mengkaji dan mengevaluasi aktivitas organisasi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Robert R. Moeller dalam bukunya Brink's Modern Internal Auditing, yaitu:

*Internal audit is an independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate its activities as a service to the organization.*<sup>5</sup>

Pengertian yang terkandung dalam definisi di atas adalah bahwa pemeriksaan intern merupakan suatu fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam suatu organisasi untuk mengkaji dan mengevaluasi aktivitas organisasi sebagai bentuk jasa yang diberikan bagi organisasi.

Pada tahun 1999 Board of Directors Institute of Internal Auditors (IIA) seperti yang disebutkan oleh Akmal dalam bukunya Pemeriksaan Intern (Internal Audit) merubah definisi pemeriksaan intern lama menjadi sebagai berikut:

*Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. Its help an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.*<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Robert R. Moeller, *Brink's Modern Internal Auditing*, (John Wiley and Sons, 2005), h. 3

<sup>6</sup> Akmal, *Pemeriksaan Intern (Internal Audit)*, (Jakarta: PT. Indeks, 2007), cet. II, h. 3

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pemeriksaan intern adalah aktivitas pengujian yang memberikan keandalan/jaminan yang independen, dan objektif serta aktivitas konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan melakukan perbaikan terhadap operasi organisasi. Aktivitas tersebut membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis, disiplin untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses yang jujur, bersih dan baik.

Perkembangan audit internal dapat dikatakan bersumber dari meningkatnya kompleksitas operasi perusahaan dan pemerintahan. Pertumbuhan perusahaan menyebabkan keterbatasan kemampuan manajer untuk mengawasi masalah operasional sehingga menjadikan audit internal sebuah fungsi yang makin penting. Audit internal modern menyediakan jasa-jasa yang mencakup pemeriksaan dan penilaian atas pengendalian intern, kinerja, risiko, dan tata kelola perusahaan publik maupun privat. Aspek keuangan hanyalah salah satu aspek saja dalam lingkup pekerjaan audit internal.

### **Tujuan dan Ruang Lingkup Pemeriksaan Intern**

Tujuan pemeriksaan intern adalah untuk membantu terhadap manajemen perusahaan secara berkesinambungan mengenai temuan-temuan kesalahan dan ketidakberesan dengan cara memberikan analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar mengenai pengendalian dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Adapun ruang lingkup pemeriksaan intern mencakup pengujian dan penilaian kelayakan dan keefektifan pengendalian manajemen bank syariah, disamping kualitas pegawai dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Lingkup pekerjaan tersebut terdiri dari:

- a. Menelaah reabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasi perusahaan yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelompokkan, dan melaporkan informasi.
- b. Menelaah sistem yang ada untuk menjamin ketaatan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang dapat mempengaruhi pada operasi dan laporan, dan menentukan apakah

organisasi mentaatinya.

- c. Menelaah cara mengamankan harta dari berbagai jenis kehilangan seperti kebakaran, pencurian dan manipulasi, serta memeriksa keberadaan harta tersebut.
- d. Menilai keekonomisan dan keefisienan sumber-sumber yang digunakan.<sup>7</sup>
- e. Menelaah operasi atau program perusahaan untuk memastikan apakah hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, dan apakah operasi dan program dilaksanakan sesuai rencana.<sup>8</sup>

Dengan demikian jelaslah bahwa ruang lingkup pekerjaan satuan kerja audit intern mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan yang secara langsung/tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya perusahaan secara baik, namun perlu diingat bahwa dengan tidak adanya pembatasan ruang lingkup audit ini, berarti tuntutan atas kinerja auditor intern semakin besar atau dapat dikatakan masalah ini tidaklah ringan dan memerlukan upaya peningkatan yang terus menerus, selain itu auditor intern harus mampu mengkomunikasikan kewenangan ruang lingkup ini kepada segenap auditee dengan sebaik-baiknya agar pekerjaannya berjalan dengan lancar.

### **Wewenang dan Tanggung Jawab Pemeriksaan Intern**

Wewenang dan tanggung jawab pemeriksa intern harus diuraikan dalam dokumen tertulis secara formal disetujui oleh manajemen dan diterima oleh dewan komisaris. Wewenang tersebut harus memberikan keleluasaan bagi pemeriksa intern untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap catatan-catatan, harta milik, operasi/aktivitas yang sudah dilaksanakan atau sedang dilaksanakan, dan para pegawai perusahaan/organisasi.<sup>9</sup>

Sedangkan tanggung jawab pemeriksa intern menurut Arthur W. Holmes dan David C. Burns dalam bukunya *Auditing Norma dan Prosedur* diantaranya adalah:

---

<sup>7</sup> Dan M. Guy, dkk, *Auditing*. Editor Yati Sumiharti, (Jakarta: Erlangga, 2003), jilid 2, h. 410

<sup>8</sup> Akmal, *Pemeriksaan Intern (Internal Audit)*, h. 10

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 10



- a. Memberikan informasi dan nasihat kepada manajemen dan menjalankan tanggung jawab ini dengan cara yang konsisten dengan kode etik Institute of Internal Auditors.
- b. Mengkoordinasi kegiatan dengan orang lain agar berhasil mencapai sasaran audit dan sasaran perusahaan.<sup>10</sup>

### Independensi Pemeriksaan Intern

Independensi merupakan suatu hal pokok untuk mencapai efektivitas pemeriksa intern. Pemeriksa intern harus independen terhadap aktivitas yang diperiksanya. Hal ini dapat terwujud jika dia melakukan tugasnya dengan bebas dan objektif. Independensi memungkinkan pemeriksa intern membuat keputusan pokok yang tidak biasa dan tidak memihak dalam melakukan tugasnya.

Independensi sangat penting bagi keefektifan pemeriksaan internal. Independensi ini terutama diperoleh oleh dua aspek, yaitu:

- a. Status Organisasi

Kedudukan pemeriksaan intern dalam perusahaan hendaklah memungkinkannya untuk melaksanakan audit yang seluas-luasnya sehingga dapat melaksanakan penilaian-penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, dan juga dapat mempertimbangkan secara memadai tindakan yang efektif atas temuan-temuan pemeriksaan dan saran-sarannya. Selain itu pemeriksannya hendaknya berada dan bertanggung jawab terhadap pejabat yang memiliki kedudukan yang cukup tinggi dan dapat menjamin ruang lingkup pemeriksaan.

- b. Objektivitas

Objektivitas merupakan sikap mental yang tidak memihak dan kejujuran atas pekerjaan yang dilakukannya. Oleh karena itu, pemeriksa intern tidak boleh terlibat dalam perancangan, penerapan dan pengoperasian sistem dan prosedur, karena hal ini akan mengurangi objektivitas dari pemeriksa intern.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Arthur W. Holmes, dkk, *Auditing Norma dan Prosedur*. Editor Marianus Sinaga, (Jakarta: Erlangga, 1993), h. 153

<sup>11</sup> *Ibid.*, H. 153

### **Profesionalisme Pemeriksaan Intern**

Pemeriksaan intern harus dilaksanakan secara ahli dan dengan ketelitian profesional. Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian pemeriksaan intern dan setiap pemeriksa intern. Pimpinan pemeriksaan intern dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.<sup>12</sup>

Kemampuan profesional itu sebagaimana disebutkan Akmal dalam bukunya *Pemeriksaan Intern (Internal Audit)*, diantaranya:

a. Kepegawaian

Unit pemeriksa intern harus menjamin dimilikinya keahlian teknis dan latar belakang pendidikan yang memadai bagi para pemeriksanya.

b. Pengetahuan dan Kecakapan

Unit pemeriksa intern harus memperoleh para pemeriksa yang mempunyai pengetahuan dan kecakapan mengenai berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

c. Supervisi

Unit pemeriksa intern harus melakukan supervisi ke para pemeriksa yang melakukan tugas pemeriksaan.<sup>13</sup>

### **Kode Etik Pemeriksaan Intern**

Selain standar, profesi pemeriksaan intern (internal audit) juga memiliki kode etik profesi yang harus ditaati dan dijalankan oleh segenap pemeriksa (auditor). Standar perilaku tersebut membentuk prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan praktik audit internal. Para pemeriksa intern (auditor internal) wajib menjalankan tanggungjawab profesinya dengan bijaksana, penuh martabat dan kehormatan. Dalam menerapkan Kode Etik ini, auditor internal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan

---

<sup>12</sup> Hiro Tugiman, *Standar Profesional Audit Internal*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1997), h. 27

<sup>13</sup> Akmal, *Pemeriksaan Intern (Internal Audit)*, h. 13

yang berlaku. Pelanggaran terhadap standar perilaku yang ditetapkan dalam kode etik ini dapat mengakibatkan dicabutnya keanggotaan auditor internal dari organisasi profesinya.

Beberapa kode etik yang harus dipatuhi para internal auditor yakni:

- a. Auditor harus menunjukkan kejujuran, objektivitas dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawab profesinya.
- b. Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani.
- c. Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan organisasinya.
- d. Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawab profesinya secara objective.
- e. Auditor internal tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis organisasinya yang dapat atau patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
- f. Auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
- g. Auditor internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar Profesi Audit internal.
- h. Auditor internal harus bersikap hari-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperolehnya dalam pelaksanaan tugasnya. Auditor Internal tidak boleh menggunakan informasi rahasia untuk dapat mendapatkan keuntungan pribadi, secara melanggar hukum atau yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya.
- i. Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang di review atau menutupi adanya praktik yang melanggar hukum.

- j. Auditor internal harus senantiasa meningkatkan kemahirannya, serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya.
- k. Auditor internal dalam pelaksanaan profesinya harus selalu memelihara standar yang tinggi mengenai kompetensinya, moralitasnya, dan menjunjung tinggi hal-hal yang diputuskan oleh lembaga perhimpunan (IIA).<sup>14</sup>

## **Pembiayaan**

### ***Pengertian Pembiayaan***

Dewasa ini, istilah kredit hanya digunakan oleh bank konvensional, sedangkan bank yang berdasarkan prinsip syariah menggunakan istilah pembiayaan. Pada dasarnya konsep kredit pada bank konvensional dengan konsep pembiayaan pada bank bank syariah tidak jauh berbeda, perbedaannya hanya terletak pada keuntungan yang diharapkan dari masing-masing bank tersebut. Pada bank konvensional keuntungan yang diperoleh dari bunga, sedangkan pada bank syariah keuntungan didapat dari sistem bagi hasil.<sup>15</sup>

Pengertian pembiayaan menurut Muhammad dalam bukunya *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>16</sup>

Menurut undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat (12) yang dikutip oleh Kasmir dalam bukunya *Dasar-Dasar Perbankan* pengertian pembiayaan adalah:

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 15

<sup>15</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) Cet. I, h. 10

<sup>16</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 17

tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan bank syariah adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh bank kepada pihak-pihak yang memerlukan *defisit unit*. Dalam hal ini, yang membutuhkan dana tersebut diperoleh dari masyarakat pula, yaitu masyarakat yang menitipkan uangnya di bank.

Dasar pemberian pinjaman kepada nasabah ini adalah kepercayaan bahwa nasabah mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman atau pembiayaan yang diberikan bank. Bank syariah percaya kepada nasabah bahwa pinjaman akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Selain unsur kepercayaan bank syariah tidak akan membiayai usaha nasabah yang mengandung hal-hal yang diharamkan oleh syariat.

### ***Pemeriksaan Intern Pada PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Garut***

Sebagaimana dikemukakan pada latar belakang penelitian bahwa pelaksanaan pemeriksaan intern terhadap tingkat penyaluran pembiayaan belum optimal, dimana terlihat dari setiap jenis pembiayaan mengalami penurunan, sebagaimana yang tercantum dalam tabel 1.1. Maka untuk mengetahui penyebab belum optimalnya pelaksanaan penerapan pemeriksaan intern terhadap tingkat penyaluran pembiayaan, penulis menggunakan analisis skoring untuk menilai setiap indikator variabel penelitian yang menjadi faktor dari pemeriksaan intern.

Pelaksanaan penerapan pemeriksaan intern atas pembiayaan dan prosedur penyaluran pembiayaan yang telah diterapkan oleh PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Garut berpedoman pada standar profesional IIA terdiri dari empat tahap kegiatan sebagai berikut:

- a. Tahap perencanaan pemeriksaan
- b. Tahap pengujian dan evaluasi
- c. Tahap penyampaian hasil pemeriksaan

---

<sup>17</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 97

d. Tahap tindak lanjut<sup>18</sup>

Keempat tahap tersebut sangat berhubungan erat dengan efektivitas penyaluran pembiayaan yang dilaksanakan oleh setiap lembaga perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah, dimana pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilahnya akitiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah pemahaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan piutang, qordh, surat berharga syariah, penempatan, peyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia<sup>19</sup>.

Untuk mengnalisa setiap variabel peneitian digunakan analisis skoring yaitu penilaian dengan melihat bobot nilai hasil penjumlahan dari setiap jawaban yang diberikan oleh responden. Jumlah tersebut kemudian di masukkan kedalam kriteria penilaian dimana harus dicari nilai rentang terlebih dahulu dengan rumus:

$$\text{Rentang} = \frac{\text{nilai maksimum} - \text{nilai min imun}}{2}$$

Kemudian ditentukan kriteria penilaian sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Kriteria Penilaian

125 – 105	Sangat Baik
104 – 85	Baik
84 – 64	Cukup Baik
64 – 45	Kurang Baik
44 – 25	Sangat Kurang Baik

Selanjutnya penulis sajikan tanggapan responden tentang pelaksanaan pemeriksaan dengan cara melakukan analisis yaitu menghitung jumlah

<sup>18</sup> Akmal, *Pemeriksaan Intern (Internal Audit)*, (Jakarta: Indek, 2007), cet.II, h. 16

<sup>19</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: EKONISIA, 2005) cet.II, h. 196

bobot nilai dari setiap jawaban yang diberikan oleh responden terhadap indikator variabel pemeriksaan intern sebagaimana yang terdapat dalam lampiran, maka hasilnya sebagai berikut :

Tabel 4.2  
Nilai bobot Variabel Pemeriksaan Intern

No	Pertanyaan	Kriteria Jawaban					JML	Kriteria
		SS	S	CS	KS	STS		
		5	4	3	2	1		
1	2				3			4
1	Setiap Pelaksanaan Pemeriksaan Intern di PT.BPRS Harum Hikmahnugraha Garut terlebih dahulu diarahkan pada bidang kepegawaian yang dilihat dari kinerja Pegawai.	13	5	4	1	2	101	baik
2	Setiap Pelaksanaan Pemeriksaan Intern di PT.BPRS Harum Hikmahnugraha Garut didukung oleh tingkat Profesional badan pemeriksa.	17	4	1	1	2	108	Sangat Baik
3	Setiap Pelaksanaan Pemeriksaan Intern di PT.BPRS Harum Hikmahnugraha Garut ditunjang tingkat pengetahuan yang memadai guna menghasilkan audit yang tepat	9	12	2	1	1	102	baik

4	Setiap Pelaksanaan Pemeriksaan Intern di PT.BPRS Harum Hikmahnugraha Garut ditunjang tingkat kecakapan yang optimal guna menghasilkan audit yang tepat	12	6	5	1	1	102	baik
5	Setiap Pelaksanaan Pemeriksaan Intern di PT.BPRS Harum Hikmahnugraha Garut dilakukan supervisi (pengawasan) dari atasan langsung secara rutin	10	12	1	1	1	104	Baik
6	Tingkat kejujuran merupakan faktor utama dalam pelaksanaan Pemeriksaan Intern di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Garut	13	5	4	1	2	101	baik
7	Setiap Pelaksanaan Pemeriksaan Intern di PT.BPRS Harum Hikmahnugraha Garut tingkat loyalitas pegawai selalu diperhatikan dalam meningkatkan kinerjanya.	10	12	1	1	1	104	baik
8	Setiap Pelaksanaan Pemeriksaan Intern di PT.BPRS Harum Hikmahnugraha Garut selalu diarahkan kepada efektivitas pelayanan terhadap nasabah.	13	5	4	1	2	101	baik



9 Dalam meningkatkan efektivitas pelayanan terhadap nasabah, setiap pegawai di PT.BPRS Harum Hikmahnugraha Garut mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi tiap bidang.	9	12	2	1	1	102	baik
10 Dalam meningkatkan kode etik pemeriksaan intern setiap badan pengawas di PT.BPRS Harum Hikmahnugraha Garut ditunjang kualitas kinerja yang optimal.	10	11	2	1	1	103	baik
11 Guna meningkatkan kualitas kinerja dalam pelaksanaan pemeriksaan intern di PT.BPRS Harum Hikmahnugraha Garut, setiap pemeriksa wajib memiliki sertifikasi keahlian dalam bidang audit.	12	6	5	1	1	102	baik
12 Setiap Pelaksanaan Pemeriksaan Intern di PT.BPRS Harum Hikmahnugraha Garut setiap auditor diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan auditing (pemeriksaan) terlebih dahulu dari pihak terkait.	15	5	4	1	109	Sangat Baik	

13	Setiap Pelaksanaan Pemeriksaan Intern di PT.BPRS Harum Hikmahnugraha Garut selalu dilakukan uji kompetensi bagi tim audit guna meningkatkan efektivitas kerja tim audit (pemeriksa)	13	7	4	1	107	Sangat Baik	
14	Uji kompetensi auditor merupakan faktor yang paling utama dalam menerapkan kode etik Pemeriksaan Intern di PT.BPRS Harum Hikmahnugraha Garut	12	8	3	1	1	104	baik
Jumlah						1450		
Rata-rata						103.57		

Sumber : Hasil Pengolahan

Berdasarkan tabel 4.2 di atas rata-rata tanggapan responden terhadap pelaksanaan pemeriksaan intern atas pembiayaan dan prosedur penyaluran pembiayaan yang telah diterapkan oleh PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Garut berada pada kriteria **baik**, atau dengan jumlah skor nilai sebesar 103,57. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan intern atas pembiayaan dan prosedur penyaluran pembiayaan yang telah diterapkan oleh PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Garut telah dilaksanakan secara optimal, dimana hal ini sejalan dengan pendapat yang disebutkan oleh Robert R. Moeller dalam bukunya Brink's Modern Internal Auditing, yaitu :

*Internal audit is an independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate its activities as a service to the organization.*<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Robert R. Moeller, *Brink's Modern Internal Auditing*, (John Wiley and Sons, 2005), h. 3

Pengertian yang terkandung dalam definisi di atas adalah bahwa pemeriksaan intern merupakan suatu fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam suatu organisasi untuk mengkaji dan mengevaluasi aktivitas organisasi sebagai bentuk jasa yang diberikan bagi organisasi.

Skor nilai tertinggi ada pada item ke 12 sebesar 109 yaitu mengenai setiap pelaksanaan pemeriksaan intern di PT.BPRS Harum Hikmahnugraha Garut setiap auditor diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan auditing (pemeriksaan) terlebih dahulu dari pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap setiap auditor diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan auditing (pemeriksaan) terlebih dahulu dari pihak terkait ditanggapi responden Sangat baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi auditor sangat diperlukan dan diselenggarakan dengan pihak terkait yang berkompeten di bidangnya. Sedangkan skor terendah pada item ke 1, 6 dan 8 sebesar 101 atau berada pada kriteria jawaban baik, yaitu mengenai setiap pelaksanaan pemeriksaan intern di PT.BPRS Harum Hikmahnugraha Garut terlebih dahulu diarahkan pada bidang kepegawaian yang dilihat dari kinerja pegawai. Tingkat kejujuran merupakan faktor utama dalam pelaksanaan pemeriksaan intern di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Garut dan setiap pelaksanaan pemeriksaan intern di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Garut selalu diarahkan kepada efektivitas pelayanan terhadap nasabah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan intern di PT.BPRS Harum Hikmahnugraha Garut, belum sepenuhnya mengarah pada kinerja maupun pada efektivitas pelayanan terhadap nasabah melainkan pada faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini antara lain, kecakapan, keterampilan dan kemampuan maupun pengetahuan tim auditor.

Prosedur penyaluran pembiayaan di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Garut antara lain melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan pembiayaan (kredit) kepada PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Garut melalui bagian Pembiayaan.
- b. Bagian Pembiayaan meneliti administrasi pengajuan pembiayaan dari pemohon dengan terlebih dahulu memeriksa dokumen pemohon yang terdiri dari:

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - 2) Kartu Keluarga
  - 3) Pas Foto Pemohon
  - 4) Tabungan sebagai Nasabah PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Garut
  - 5) Jaminan Kredit ( Surat Keputusan, Sertifikat Rumah, BPKB )
  - 6) Surat keterangan penghasilan / Fotocopy Slip Gaji bagi karyawan / PNS
  - 7) Persyaratan lainnya yang mengikat dalam kontrak pembiayaan.
  - 8) Surat keterangan penggunaan pembiayaan.
- c. Apabila dokumen pemohon lengkap dan akurat, maka Bagian pembiayaan memproses pengajuan pembiayaan sesuai persetujuan/disposisi direksi, selanjutnya pemohon/nasabah menandatangani surat perjanjian kredit / pembiayaan.
- d. Apabila dokumen pemohon tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka pihak PT. BPRS menolak/tidak memproses penyaluran pembiayaan.
- e. Pencairan/penyaluran pembiayaan dilakukan di Bagian Kas sesuai dengan dokumen pengajuan dari pemohon dan persetujuan pimpinan PT. BPRS.
- f. Pelunasan pembiayaan adalah kewajiban utang peminjam kepada bank telah terpenuhi sehingga terhapusnya ikatan perjanjian pembiayaan.<sup>21</sup>
- a. Pengujian Validitas Variabel Pelaksanaan Pemeriksaan Intern

Pengujian validitas instrumen penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji korelasi *Product Momen Pearson* yang perhitungannya terdapat dalam lampiran dengan hasil sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Standar Operasional Pembiayaan PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Garut

Tabel 4.3  
 Hasil Uji Korelasi Product Momen Pearson Antara Pemeriksaan Intern dengan Profesionalisme Aspek Kinerja

$r_{xy}$	$t_{hit}$	$t_{tabel}$	Kesimpulan
0,630	3.893	1.714	Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka $H_0$ ditolak, terdapat hubungan yang signifikan

Berdasarkan hasil perhitungan (tabel 4.3) diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan taraf signifikansi 0,05 dan  $dk = 0,88$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dengan  $r_{xy} = 0,630$ . Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemeriksaan intern dengan profesionalisme yang dilihat dari aspek kinerja di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Garut.

Tabel 4.4  
 Hasil Uji Korelasi Product Momen Pearson Antara Pemeriksaan Intern dengan Profesionalisme Aspek Keahlian

$r_{xy}$	$t_{hit}$	$t_{tabel}$	Kesimpulan
0,340	1,736	1.714	Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka $H_0$ ditolak, terdapat hubungan yang signifikan

Berdasarkan hasil perhitungan (tabel 4.4) diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan taraf signifikansi 0,05 dan  $dk = 0,88$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dengan  $r_{xy} = 0,340$ . Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemeriksaan intern dengan profesionalisme yang dilihat dari aspek keahlian di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Garut.

Tabel 4.5  
 Hasil Uji Korelasi Product Momen Pearson Antara Pemeriksaan Intern dengan Profesionalisme Aspek Tingkat Keahlian

$r_{xy}$	$t_{hit}$	$t_{tabel}$	Kesimpulan
0.405	2,123	1.714	Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka $H_0$ ditolak, terdapat hubungan yang signifikan

Berdasarkan hasil perhitungan (tabel 4.5) diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan taraf signifikansi 0,05 dan  $dk = 0,88$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dengan  $r_{xy} = 0,405$ . Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemeriksaan intern dengan

profesionalisme yang dilihat dari aspek tingkat keahlian di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Garut.

Tabel 4.6  
Hasil Uji Korelasi Product Momen Pearson Antara Pemeriksaan Intern dengan Profesionalisme Aspek Tingkat Kecakapan Pemeriksa

$r_{xy}$	$t_{hit}$	$t_{tabel}$	Kesimpulan
0,448	2,402	1.714	Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka $H_0$ ditolak, terdapat hubungan yang signifikan

Berdasarkan hasil perhitungan (tabel 4.6) diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan taraf signifikansi 0,05 dan  $dk = 0,88$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dengan  $r_{xy} = 0,448$ . Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemeriksaan intern dengan profesionalisme yang dilihat dari aspek tingkat kecakapan pemeriksa di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Garut.

Tabel 4.7  
Hasil Uji Korelasi Product Momen Pearson Antara Pemeriksaan Intern dengan Profesionalisme Aspek Supervisi

$r_{xy}$	$t_{hit}$	$t_{tabel}$	Kesimpulan
0,754	5.498	1.714	Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka $H_0$ ditolak, terdapat hubungan yang signifikan

Berdasarkan hasil perhitungan (tabel 4.7) diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan taraf signifikansi 0,05 dan  $dk = 0,88$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dengan  $r_{xy} = 0,754$ . Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemeriksaan intern dengan profesionalisme yang dilihat dari aspek supervisi di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Garut.

Tabel 4.8  
Hasil Uji Korelasi Product Momen Pearson Antara Pemeriksaan Intern dengan Kode Etik Pemeriksaan Intern Aspek Tingkat Kejujuran

$r_{xy}$	$t_{hit}$	$t_{tabel}$	Kesimpulan
0,661	4,226	1.714	Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka $H_0$ ditolak, terdapat hubungan yang signifikan

Berdasarkan hasil perhitungan (tabel 4.8) diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan taraf signifikansi 0,05 dan  $dk = 0,88$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dengan  $r_{xy} = 0,661$ . Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemeriksaan intern dengan kode etik pemeriksaan yang dilihat dari aspek tingkat kejujuran di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Garut.

Tabel 4.9  
Hasil Uji Korelasi Product Momen Pearson Antara Pemeriksaan Intern dengan Kode Etik Pemeriksaan Intern Aspek Loyalitas

$r_{xy}$	$t_{hit}$	$t_{tabel}$	Kesimpulan
0,374	1,935	1.714	Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka $H_0$ ditolak, terdapat hubungan yang signifikan

Berdasarkan hasil perhitungan (tabel 4.9) diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan taraf signifikansi 0,05 dan  $dk = 0,88$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dengan  $r_{xy} = 0,374$ . Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemeriksaan intern dengan kode etik pemeriksa intern yang dilihat dari aspek loyalitas di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Garut.

Tabel 4.10  
Hasil Uji Korelasi Product Momen Pearson Antara Pemeriksaan Intern dengan Kode Etik Pemeriksaan Intern Aspek Efektivitas

$r_{xy}$	$t_{hit}$	$t_{tabel}$	Kesimpulan
0,560	3,242	1.714	Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka $H_0$ ditolak, terdapat hubungan yang signifikan

Berdasarkan hasil perhitungan (tabel 4.10) diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan taraf signifikansi 0,05 dan  $dk = 0,88$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dengan  $r_{xy} = 0,560$ . Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemeriksaan intern dengan kode etik pemeriksaan intern yang dilihat dari aspek efektivitas pelayanan di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Garut.

Tabel 4.11  
Hasil Uji Korelasi Product Momen Pearson Antara Pemeriksaan Intern dengan Kode Etik Pemeriksaan Intern Aspek Tupoksi

$r_{xy}$	$t_{hit}$	$t_{tabel}$	Kesimpulan
0,405	2,123	1.714	Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka $H_0$ ditolak, terdapat hubungan yang signifikan

Berdasarkan hasil perhitungan (table 4.11) diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan taraf signifikasi 0,05 dan  $dk = 0,88$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dengan  $r_{xy} = 0,405$ . Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemeriksaan intern dengan kode etik pemeriksaan intern yang dilihat dari aspek tupoksi di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Garut.

Tabel 4.12  
Hasil Uji Korelasi Product Momen Pearson Antara Pemeriksaan Intern dengan Kode Etik Pemeriksaan Intern Aspek Kualitas Kerja

$r_{xy}$	$t_{hit}$	$t_{tabel}$	Kesimpulan
0,362	1,860	1.714	Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka $H_0$ ditolak, terdapat hubungan yang signifikan

Berdasarkan hasil perhitungan (tabel 4.12) diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan taraf signifikasi 0,05 dan  $dk = 0,88$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dengan  $r_{xy} = 0,362$ . Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemeriksaan intern dengan kode etik pemeriksaan intern yang dilihat dari aspek kualitas kinerja di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Garut.

Tabel 4.13  
Hasil Uji Korelasi Product Momen Pearson Antara Pemeriksaan Intern dengan Kode Etik Pemeriksaan Intern Aspek Sertifikasi

$r_{xy}$	$t_{hit}$	$t_{tabel}$	Kesimpulan
0,422	2,235	1.714	Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka $H_0$ ditolak, terdapat hubungan yang signifikan



Berdasarkan hasil perhitungan (tabel 4.13) diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan taraf signifikansi 0,05 dan  $dk = 0,88$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dengan  $r_{xy} = 0,422$ . Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemeriksaan intern dengan kode etik pemeriksaan intern yang dilihat dari aspek sertifikasi di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Garut.

Tabel 4.14

Hasil Uji Korelasi Product Momen Pearson Antara Pemeriksaan Intern dengan Kode Etik Pemeriksaan Intern Aspek Pendidikan dan Pelatihan Auditing

$r_{xy}$	$t_{hit}$	$t_{tabel}$	Kesimpulan
0,754	5,498	1.714	Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka $H_0$ ditolak, terdapat hubungan yang signifikan

Berdasarkan hasil perhitungan (tabel 4.14) diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan taraf signifikansi 0,05 dan  $dk = 0,88$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dengan  $r_{xy} = 0,754$ . Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemeriksaan intern dengan kode etik pemeriksaan intern yang dilihat dari aspek pendidikan dan pelatihan auditing di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Garut.

Tabel 4.15

Hasil Uji Korelasi Product Momen Pearson Antara Pemeriksaan Intern dengan Kode Etik Pemeriksaan Intern Aspek Efektivitas Kerja

$r_{xy}$	$t_{hit}$	$t_{tabel}$	Kesimpulan
0,765	5,691	1.714	Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka $H_0$ ditolak, terdapat hubungan yang signifikan

Berdasarkan hasil perhitungan (tabel 4.15) diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan taraf signifikansi 0,05 dan  $dk = 0,88$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dengan  $r_{xy} = 0,765$ . Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemeriksaan intern dengan kode etik pemeriksaan intern yang dilihat dari aspek efektivitas kerja di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Garut.

Tabel 4.16  
 Hasil Uji Korelasi Product Momen Pearson Antara Pemeriksaan Intern dengan  
 Kode Etik Pemeriksaan Intern Aspek Kompetensi

$r_{xy}$	$t_{hit}$	$t_{tabel}$	Kesimpulan
0,664	4,259	1.714	Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka $H_0$ ditolak, terdapat hubungan yang signifikan

Berdasarkan hasil perhitungan (tabel 4.16) diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan taraf signifikansi 0,05 dan  $dk = 0,88$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dengan  $r_{xy} = 0,664$ . Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemeriksaan intern dengan kode etik pemeriksaan intern yang dilihat dari aspek kompetensi di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Garut.

### Pengujian Realibilitas

Pengujian reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini digunakan teknik yang digunakan adalah *Alfa Cronbach*, hasil-hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh alat ukur penelitian reliabel, sebagaimana yang terdapat dalam lampiran. Adapun hasil pengujian menunjukkan sebagaimana terlihat pada table berikut ini:

Tabel 4.17  
 Hasil Uji Reliabelitas pada Variabel Pemeriksaan Intern

Var. Total	44.153
Var. Butir	10.909
r alfa	0.811
t hitung	6.644
t table	1.714
Keputusan	RELIABEL

### Penutup

Hasil analisis terhadap pelaksanaan pemeriksaan intern terhadap tingkat penyaluran pembiayaan (kredit) memiliki nilai rata-rata pelaksanaan

pemeriksaan intern sebesar 103,57, artinya bahwa pelaksanaan pemeriksaan intern terhadap tingkat penyaluran pembiayaan kredit di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Garut telah dilaksanakan secara optimal dapat dikatakan baik karena berada pada interval 104 - 85. Skor nilai tertinggi ada pada item ke 12 sebesar 109 yaitu mengenai Setiap Pelaksanaan Pemeriksaan Intern di PT.BPRS Harum Hikmahnugraha Garut setiap auditor diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan auditing (pemeriksaan) terlebih dahulu dari pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap setiap auditor diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan auditing (pemeriksaan) terlebih dahulu dari pihak terkait ditanggapi responden Sangat baik. Sedangkan skor terendah pada item ke 1, 6 dan 8 sebesar 101 atau berada pada kriteria jawaban **baik**, yaitu mengenai Setiap Pelaksanaan Pemeriksaan Intern di PT.BPRS Harum Hikmahnugraha Garut terlebih dahulu diarahkan pada bidang kepegawaian yang dilihat dari kinerja Pegawai. Tingkat kejujuran merupakan faktor utama dalam pelaksanaan Pemeriksaan Intern di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Garut dan Setiap Pelaksanaan Pemeriksaan Intern di PT.BPRS Harum Hikmahnugraha Garut selalu diarahkan kepada efektivitas pelayanan terhadap nasabah. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pemeriksaan Intern di PT.BPRS Harum Hikmahnugraha Garut, belum sepenuhnya mengarah pada kinerja maupun pada efektivitas pelayanan terhadap nasabah melainkan pada faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini antara lain, kecakapan, keterampilan dan kemampuan maupun pengetahuan tim auditor. Hasil analisis terhadap Tingkat Penyaluran Pembiayaan di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Garut, berada pada kriteria jawaban **baik** atau sebesar 103,78. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Tingkat Penyaluran Pembiayaan di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Garut telah optimal dalam pelaksanaannya baik dilihat dari prosedur penyaluran dan efektivitas pelayanan penyaluran pembiayaan. Skor nilai tertinggi pada item 17 yaitu sebesar 110, mengenai tingkat kemampuan nasabah merupakan salah satu syarat penilaian kredit, hal ini sangat menunjang efektivitas penyaluran pembiayaan di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Garut. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran pembiayaan di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Garut telah berorientasi pada tingkat

kemampuan nasabah. Kondisi ini sesuai tanggapan sebagian besar responden terhadap hal tersebut sangat baik. Sedangkan skor nilai terendah berada pada item ke 15 dan 20 sebesar 101 yaitu mengenai setiap penyaluran pembiayaan (kredit) di PT.BPRS Harum Hikmahnugraha Garut terlebih dahulu dilihat karakteristik nasabah dan setiap nasabah yang mengajukan kredit (pembiayaan) di PT.BPRS Harum Hikmahnugraha Garut, dilihat dari segi kemampuan modal (aset yang dimiliki baik berupa tanah/ bangunan maupun barang berharga lainnya ). Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan penyaluran pembiayaan, karakteristik nasabah belum sepenuhnya menjadi perhatian atau syarat penyaluran pembiayaan akan tetapi factor kemampuan nasabah dan jaminan yang selalu diperhitungkan dalam penentuan penyaluran pembiayaan. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh tanggapan responden terhadap karakteristik nasabah dan kemampuan modal nasabah dengan skor nilai sebesar 101.

Hasil perhitungan menghasilkan nilai koefisien korelasi 0,7768 artinya bahwa hubungan yang terjadi antara kedua variabel sangat kuat karena berada pada interval 0,80 – 1,000. Artinya hubungan pemeriksaan intern dengan variabel tingkat penyaluran pembiayaan sangat signifikan.

Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat penyaluran pembiayaan, dimana salah satunya pelaksanaan pemeriksaan intern, meskipun lebih dominan namun ada faktor lain yang mempengaruhinya. Setelah melalui perhitungan statisti maka didapat  $t_{tabel} = 1.714$  dan  $t_{hitung} = 8.946$  dengan demikian  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak artinya terdapat pengaruh pemeriksaan intern berpengaruh terhadap variabel tingkat penyaluran pembiayaan sebesar 77,68%, sedangkan sisanya sebesar 22,32% dapat dijelaskan oleh faktor lain.

### **Pustaka Acuan**

- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Tazkia Institute, 2001.
- Akmal. *Pemeriksaan Intern (Internal Audit)*. cet.II. Jakarta: Indek, 2007.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, cet.IV. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.

- Guy, Dan M. Dkk. dan Sumiharti, Yati. Ed. *Auditing*, jilid 2. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Hartadi, Bambang. *Sistem Pengendalian Intern dalam Hubungannya dengan Manajemen dan Audit*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999.
- Holmes, Arthur W dan Burns, David C. dan Sinaga, Marianus. Ed. *Auditing: Norma dan Prosedur*. Jakarta: Erlangga, 1993.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002.
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafiindo Persada, 2004.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Perbankan*, cet. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Mauludi, Ali. *Statistika I: Penelitian Ekonomi Islam dan Sosial*. Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006.
- Moeller, Robert R. *Brink's Modern Internal Auditing*. John Wiley and Sons, 2005.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*, cet.II. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Mulyono. *Manajemen Prekreditasi*. Yogyakarta: Penerbit BPFE, 1996.
- Nasution, Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, cet.VI. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Rivai, Veithzal dan Veithzal, Andria Permata. *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Mahasiswa, Bankir dan Nasabah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rochaety, Ety. dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis Dengan Aplikasi SPSS*.

Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007.

Singarimbun dan Effendi, Sofian. Ed. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 2006.

Sinungan, Muchdarsyah. *Manajemen Dana Bank Syariah*. cet.IV. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Tugiman, Hiro. *Standar Profesional Audit Internal*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1997.

Wawancara Pribadi dengan Asep Budi Aliyasa. Garut. 7 Agustus 2009

\_\_\_\_\_, Jakarta. 9 Desember 2009